

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena terkait implementasi kebijakan *tax amnesty* yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Kebijakan tersebut muncul karena dilatarbelakangi oleh adanya penurunan terhadap capaian pajak selama beberapa tahun terakhir. Implementasi kebijakan tersebut melibatkan sektor perbankan sebagai penerima dan pengelola dana tebusan dan repatriasi aset dari wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh implementasi *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan pada periode sebelum dan setelah *tax amnesty*. Variabel *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi, struktur kepemilikan, pengungkapan implementasi *corporate governance*, dan kualifikasi pendidikan direktur utama.

Penelitian ini menggunakan populasi yaitu perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2014-2017. Berdasarkan metode *purposive sampling* yang digunakan, terdapat 236 sampel perusahaan yang terdiri dari 118 perusahaan pada periode sebelum dan setelah *tax amnesty*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat analisis Manova untuk pengujian seluruh hipotesis.

Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan pada periode sebelum dan setelah *tax amnesty*. Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada periode sebelum dan setelah *tax amnesty*. Pengungkapan implementasi *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada periode sebelum dan setelah *tax amnesty*. Kualifikasi pendidikan direktur utama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada periode sebelum dan setelah *tax amnesty*.

Kata kunci : kinerja perbankan, dewan direksi, struktur kepemilikan, pengungkapan implementasi *corporate goverance*, kualifikasi pendidikan direktur utama